

JURNAL

EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013

Oleh :

Foni Susanti¹, Ari Subowo, dan Aloysius Rengga

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO 2014

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pada Tahun Anggaran 2013 Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran (DAK) sebesar Rp 2.229.164.420.000,- yang diperuntukkan bagi 35 kabupaten / kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap merupakan penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar di antara 35 kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah, yaitu Rp. 108.157.350. Hasil kegiatan DAK bidang pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2013 meliputi 2 bagian, yaitu pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA dan SMK). Kedua bidang pendidikan tersebut diatur oleh Keputusan Bupati Cilacap nomor 425 / 428 / 14 / tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cilacap.

Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dasar sudah memberikan hasil yang diharapkan secara maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan dasar berkaitan dengan kebijakan keuangan, bukan faktor teknis di sekolah penerima. Karena berkaitan dengan kebijakan lainnya, maka hal ini tidak / belum bisa dikatakan sebagai masalah dalam penyelenggaraan kegiatan DAK. Tujuan kegiatan DAK bidang pendidikan dasar sudah terwujud. Usaha yang dilakukan dari indikator *input*, *process*, dan *output*, semuanya sudah baik. Maka, dampak yang diharapkan sudah sebanding dengan usaha yang dilakukan. Tingkat kelulusan tergolong tinggi dan angka ketidaklulusan sangat kecil.

Kegiatan DAK bidang pendidikan menengah belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan menengah. Tujuan kegiatan DAK pendidikan menengah belum terwujud secara maksimal. Realisasinya sebesar 50%. Dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan maupun sekolah penerima dari indikator *input*, *process*, dan *output*, sudah baik, buktinya angka kelulusan 100% atau mendekati 100%. Dampak yang diharapkan sudah sebanding dengan usaha yang telah dilakukan.

Kata kunci : Dana Alokasi Khusus, Kabupaten Cilacap, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah

ABSTRACT

At the Budget Year 2013, the Province of Central Java gets budget allocation (DAK) as many of Rp 2.229.164.420.000,- that allocated for 35 district / cities and Provincial Governments of Central Java. District Cilacap is the largest receiver of DAK between 35 district / cities in the province of Central Java as many of Rp. 108.157.350. The result of DAK activities on the field of education in District Cilacap 2013 consist of primary education (Elementary School and Secondary School) and secondary education (High School and Vocational High School). Both of them are regulated by the decision of Regent of District Cilacap number 425 / 428 / 14 / 2013 about the Establishment of Educational Institutions of the Recipient of Special Allocation Funds on the Field of Education in Budget Year 2013 at Department of Education, Youth and Sport District Cilacap.

The activities of Special Allocation Funds (DAK) on the field of primary education have given the maximum result as expected. Inhibit factor of activities enforcement of DAK on primary education is related to financial policy, it isn't technical factor in beneficiary school. Because it is related to another policy, it can't be said as a problem on DAK activity implementation. The aim of DAK activities on the field of primary education is implemented. The efforts such as input, process, and output indicator are good. The graduation rates are considerably higher and not passing rates are lower.

DAK activities on the field of secondary education still not entirely provide expected result. There are inhibit factors on the activity implementation of DAK in secondary education. The aim of DAK activities on secondary education has not maximum implemented. The realization by 50%. It can be seen on input, process, and output of Department of Education and beneficiary school efforts are good. It is profoundly that the graduation rates are 100% or almost 100%. The expected impacts was comparable with the efforts.

Keywords : Special Allocation Funds, District Cilacap, Primary Education, Secondary Education

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.

Dana Alokasi Khusus atau DAK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alasan pengambilan judul ini adalah karena kabupaten Cilacap merupakan penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar di antara 35 kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah, yaitu Rp. 108.157.350. (Sumber : *Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013*. Semarang).

A.2. TUJUAN

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2013.
2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di kabupaten Cilacap tahun anggaran 2013.
3. Mengidentifikasi dampak dari kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan pada sekolah-sekolah di kabupaten Cilacap tahun anggaran 2013.

A.3. TEORI

A.3.1. Evaluasi Kebijakan Publik

A.3.1.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno, (2007 : 225) bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Menurut Finance (1994 : 4) dalam Badjuri (2003 : 135) ada 4 dasar evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectifness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*), dan evaluasi meta (*meta-evaluations*). Evaluasi Efektivitas, meliputi 3 pertanyaan pokok : a) Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan? b) Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud? c) Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan?

Menurut Badjuri (2003 : 138), pengukuran evaluasi bervariasi sesuai dengan tipe evaluasinya. Tipe evaluasi kecocokan, efektivitas dan efisiensi mungkin

memerlukan investigasi yang mendalam sebelum sampai pada kesimpulan akhir. Ini berarti bahwa evaluasi sebagaimana pembuatan kebijakan juga membutuhkan data dan informasi yang komplit dan akurat berkaitan dengan implementasi kebijakan publik tertentu. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu pada empat indikator pokok yaitu indikator *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* (Bridgman & Davis, 2000 : 130 dalam Badjuri).

Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya. Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem / proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, dan seterusnya. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat atau pihak yang terkena kebijakan.

A.4. METODE

Sumber dan Jenis Data :

Data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD). Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis meninjau langsung ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Cilacap
- b. Wawancara, dimaksudkan untuk menyerap informasi mengenai persepsi, pandangan, pola pikir, pendapat / interpretasi masalah penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara memerlukan suatu instrumen, yaitu *interview guide* (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila narasumber kurang aktif di dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan kepada pejabat / pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Cilacap.
- c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Dokumen / arsip yang penulis gunakan yaitu Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- a.) Editing, yaitu data yang diperoleh perlu diproses dahulu sebelum disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh, sehingga kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya dapat dihindari. Hal ini untuk meneliti kesempurnaan dan ketepatan dari data dan informasi yang diperoleh.
- b.) Koding, yaitu data yang diperoleh perlu diproses terlebih dahulu dengan cara memilih dan mengelompokkan dalam kelompoknya masing-masing.
- c.) Tabulasi, yaitu data yang diperoleh perlu diproses dahulu untuk dijadikan tabel untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

B.1. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

Realisasi pelaksanaan DAK 2013 bidang pendidikan dasar memiliki 18 kegiatan. Dari 18 kegiatan tersebut, 11 kegiatan telah tercapai 100%. Sisanya ada 7 kegiatan yang realisasinya belum mencapai 100%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan DAK pendidikan dasar tercapai sebanyak 11/18 atau 61%. Sedangkan yang 39% masih belum terealisasi karena ada beberapa permasalahan.

Pertama, pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD ada 242 sekolah pelaksana, tetapi hanya tercapai 240 sekolah karena ada 2 SD swasta. Kedua, pada kegiatan pembangunan perpustakaan SMP (dana pendamping 2013) realisasinya sebesar 3 dari 4 sekolah penerima. Masalahnya karena ada 1 sekolah swasta. Ketiga, pada pembangunan laboratorium IPA / Bahasa (SMP), (dengan dana pendamping 2013) ada 5 sekolah tetapi hanya 3 sekolah yang terealisasi. Keempat, pada pengadaan alat laboratorium IPA / IPS / matematika / bahasa / olahraga SMP (dana pendamping 2013) ada 26 sekolah pelaksana tetapi hanya 11 sekolah yang terealisasi. Kelima, pada pengadaan peralatan pendidikan SD (dengan pendamping 2013) meliputi alat matematika, IPA, IPS, Bahasa, penjas-orkes, seni budaya keterampilan semuanya sudah teralisasi 100% karena semua sekolahnya adalah sekolah negeri.

Kemudian untuk pembangunan ruang perpustakaan SD, rehab ruang kelas rusak sedang (SMP) (dana pendamping 2013), pembangunan ruang kelas baru (SMP), (dana pendamping 2013), masing-masing realisasinya sudah tercapai 100%. Kesimpulannya, perbedaan yang dipakai adalah status sekolah negeri atau swasta. Sekolah negeri masuk kode rekening DPA belanja langsung, sedangkan sekolah swasta di dalam DPA termasuk belanja hibah. Dalam kegiatan DAK, kode rekening DPA sekolah swasta harus diubah menjadi belanja hibah, dan akan direalisasikan pada tahun berikutnya.

Tabel B.1

Target dan Realisasi DAK Pendidikan Dasar

No.	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	Realisasi (Ya / tdk)	Capaian (%)	Jumlah dana
1.	rehabilitasi ruang kelas SD	242	240	-	99,17%	22.749.753.600
2.	pembangunan ruang perpustakaan SD	90	90	✓	100%	10.255.896.000
3.	rehab ruang kelas rusak sedang (SMP) (dana pendamping 2013)	5	5	✓	100%	461.700.000
4.	pembangunan ruang kelas baru (SMP), (dana pendamping 2013)	5	5	✓	100%	930.240.000
5.	pembangunan perpustakaan SMP (dana pendamping 2013)	4	3	-	75%	813.960.000
6.	pembangunan laboratorium IPA / Bahasa (SMP) (dana	5	3	-	60%	1.138.575.000

	pendamping 2013)					
7.	pengadaan alat laboratorium IPA / IPS / matematika / bahasa / olahraga SMP (dana pendamping 2013)	26	11	-	42,30%	482.238.500
8.	pengadaan alat laboratorium Bahasa Indonesia SMP	1	1	✓	100%	125.000.000
9.	Alat laboratorium IPA SMP	4	2	-	50%	200.000.000
10.	Alat laboratorium IPS SMP	10	4	-	40%	90.000.000
11.	Alat peraga matematika SMP	11	4	-	36,36%	67.238.500
12.	Pengadaan peralatan pendidikan SD (dengan pendamping 2013)	150	150	✓	100%	1.103.928.996
13.	Matematika	20	20	✓	100%	195.912.000
14.	IPA	24	24	✓	100%	199.200.000
15.	IPS	24	24	✓	100%	144.000.000
16.	Bahasa	19	19	✓	100%	200.450.000
17.	Penjas / orkes	14	14	✓	100%	193.200.000
18.	Seni-budaya-keterampilan	49	49	✓	100%	171.166.996

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, 2013

B.2. Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)

Kegiatan DAK bidang pendidikan menengah memiliki 6 kegiatan. Dari 6 kegiatan, ada 3 kegiatan yang realisasinya telah tercapai 100%. Sedangkan yang 3 kegiatan belum tercapai 100%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan DAK pendidikan menengah tercapai sebanyak 3/6 atau 50%. Sedangkan yang 50% masih belum terealisasi karena ada beberapa permasalahan. Pertama, pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas, 25 SMA dan 46 SMK hanya tercapai 25 SMA dan 44 SMK. Hal ini disebabkan ada 2 SMK yang kerusakannya masih sangat ringan. Sehingga tidak perlu diperbaiki. Dengan demikian, tidak membutuhkan dana DAK. Kedua, pada kegiatan pembangunan laboratorium, dari 10 SMA dan 40 SMK hanya 10 SMA dan 38 SMK yang terealisasi. Karena ada 2 SMK yang tidak punya lahan kosong untuk membangun. Ketiga, pada kegiatan pembangunan perpustakaan, pengadaan alat laboratorium SMA dan alat laboratorium SMK sudah tercapai 100%. Sedangkan pada kegiatan pengadaan buku teks pelajaran / buku referensi realisasinya masih 0%, alasannya, buku baru dilelang pada tahun 2014.

Tabel B.2

Target dan Realisasi DAK Pendidikan Menengah

No.	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	Realisasi (Ya / tdk)	Capaian (%)	Jumlah dana
1.	Rehabilitasi ruang kelas	25 SMA dan 46 SMK	25 + 44	-	97,18%	9.993.060.000
2.	Pembangunan laboratorium	10 SMA dan 40 SMK	10 + 38	-	96%	8.453.094.000
3.	Pembangunan perpustakaan	4 SMA dan 13 SMK	4 + 13	✓	100%	3.530.016.000
4.	Alat laboratorium SMA	4	4	✓	100%	400.000.000
5.	Alat laboratorium SMK	14	14	✓	100%	1.400.000.000
6.	Buku teks pelajaran / buku referensi	107	0	-	0%	1.180.641.600

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, 2013

B.3. Hasil Evaluasi Efektivitas

Menunjuk teori Finance (1994) dalam Badjuri (2003 : 135) ada 4 dasar evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectifness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*), dan evaluasi meta (*meta-evaluations*). Dalam penelitian ini, yang dipakai adalah evaluasi efektivitas. Kebijakan yang dipakai sebagai pedoman di sini adalah Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor 425 / 428 / 14 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013. Berikut ini penyajian data hasil evaluasi dengan pertanyaan / indikator efektivitas.

B.3.1. SD dan SMP (Pendidikan Dasar)

1. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan? Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dasar sudah memberikan hasil yang diharapkan secara maksimal. Dapat dibuktikan pada tabel 3.1 tentang target dan realisasi DAK pendidikan dasar. Bahwa keseluruhan ada 18 kegiatan. Dari 18 kegiatan itu baru terealisasi sebanyak 11 kegiatan. Sehingga, capaian kegiatan DAK pendidikan dasar sebesar 61%. Mengapa dikatakan telah maksimal? Karena faktor yang menghambat

pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan dasar adalah satu faktor saja, yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, bukan faktor teknis di sekolah penerima. Kebijakan keuangan itu mengenai perbedaan tata cara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam penerimaan dana. Di mana sekolah negeri dapat terealisasi pada tahun yang bersangkutan, sedangkan sekolah swasta terealisasi pada tahun berikutnya. Karena berkaitan dengan kebijakan lainnya, maka hal ini tidak / belum bisa dikatakan sebagai masalah dalam penyelenggaraan kegiatan DAK. Penyelesaian persoalannya tidak cukup hanya melibatkan satu instansi saja. Bisa terjadi di sini, bahwa dampak suatu kebijakan terimplikasi oleh kebijakan yang lain. Mengenai dampak (manfaat) kebijakan yang diharapkan, kegiatan DAK pendidikan dasar telah memberi dampak positif. Kegiatan belajar-mengajar menjadi nyaman dan lancar. Hasil kelulusan SD menurut tabel 3.3 dan tabel 3.4 menunjukkan adanya peningkatan. Dengan kelulusan SD pada tahun ajaran 2012/2013 sebesar 99,98% dan tahun ajaran 2013/2014 menjadi 100%. Kelulusan SMP / sederajat dari tahun ajaran 2012/2013 ke tahun 2013/2014 juga mengalami peningkatan.

2. **Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud?** Tujuan kegiatan DAK bidang pendidikan dasar sudah terwujud, tetapi belum maksimal. Tujuan itu tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor 425 / 428 / 14 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013. Tertulis jumlah sekolah (target) dari kegiatan DAK tahun 2013. Namun, pada tabel 3.1 realisasi kegiatan sebesar 61% dan sisanya 39% belum terealisasi. Dapat dikatakan tujuannya sudah terwujud, tetapi baru 61% saja.
3. **Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan?** Dengan uraian tentang indikator *input, process, dan output*, peneliti menemukan bahwa semua unsur itu sudah baik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas dan pihak sekolah penerima telah maksimal. Maka, dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Tingkat kelulusan tergolong tinggi dan angka ketidaklulusan pada pendidikan dasar, sangat kecil. Walaupun capaian kegiatan DAK pendidikan dasar di sini 61%, namun kelulusan tetap tinggi, yaitu 100% atau setidaknya mendekati 100%. Tidak pernah di bawah

95%. Bahkan, pihak Dinas mengatakan bahwa kelulusan tidak dipengaruhi DAK secara langsung, melainkan kemampuan siswa dalam mengerjakan Ujian Nasional, karena semua siswa mendapat fasilitas yang sama dari segi alat belajar.

B.3.2. SMA dan SMK (Pendidikan Menengah)

- 1. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan?** Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan menengah belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Pada tabel 3.2 ada 6 kegiatan, dan hanya 3 kegiatan yang terealisasi atau sebesar 50%. Sisanya 50% belum terealisasi. Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan menengah antara lain sekolah penerima yang tidak mengalami kerusakan, tidak ada infrastruktur berupa lahan untuk membangun, kemudian ada keterlambatan pelelangan belanja produk DAK berupa buku pelajaran, sehingga baru bisa direalisasikan pada tahun berikutnya. Mengenai dampak kebijakan, kegiatan DAK ini telah memberikan dampak positif. Yaitu angka kelulusan 100% atau mendekati 100% dengan berbagai variasi jurusan pada SMA (ada yang meningkat, ada yang menurun). Walaupun angka kelulusan tahun ajaran 2012/2013 lebih tinggi dibandingkan tahun ajaran 2013/2014, tetapi angka ketidakkelulusan mereka sangat kecil.
- 2. Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud?** Tujuan kegiatan DAK pendidikan menengah sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor 425 / 428 / 14 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, belum terwujud secara maksimal. Karena dari target yang ada pada tabel 3.2 realisasinya sebesar 50%, tujuan kegiatan ini terwujud 50% saja, bisa dikatakan sudah terwujud sebagian.
- 3. Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan?** Dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan maupun sekolah penerima dari indikator *input*, *process*, dan *output*, dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Tingkat kelulusan tergolong tinggi, ada yang 100%, ada yang mendekati 100%, dan tidak pernah kurang dari 95%. Adapun angka ketidakkelulusan pada pendidikan menengah sangat kecil. Kelulusan siswa bukan permasalahan DAK, karena setiap siswa diberi

fasilitas yang sama dan kewajiban yang sama juga dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

1. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dasar sudah memberikan hasil yang diharapkan secara maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan dasar berkaitan dengan kebijakan keuangan, bukan faktor teknis di sekolah penerima. Karena berkaitan dengan kebijakan lainnya, maka hal ini tidak / belum bisa dikatakan sebagai masalah dalam penyelenggaraan kegiatan DAK. Di sini, dampak suatu kebijakan terimplikasi oleh kebijakan yang lain. Mengenai dampak (manfaat) kebijakan yang diharapkan, kegiatan DAK pendidikan dasar telah memberi dampak positif. Kegiatan belajar-mengajar menjadi nyaman dan lancar. Hasil kelulusan SD menunjukkan adanya peningkatan dari 99,98% menjadi 100%. Kelulusan SMP / sederajat juga mengalami peningkatan.
2. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan menengah belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan menengah antara lain sekolah penerima yang tidak mengalami kerusakan, tidak ada infrastruktur berupa lahan untuk membangun, kemudian ada keterlambatan pelelangan belanja produk DAK berupa buku pelajaran, sehingga baru bisa direalisasikan pada tahun berikutnya. Mengenai dampak kebijakan, kegiatan DAK ini telah memberikan dampak positif. Yaitu angka kelulusan 100% atau mendekati 100%.
3. Tujuan kegiatan DAK bidang pendidikan dasar sudah terwujud, tetapi belum maksimal. Tujuan itu tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor 425 / 428 / 14 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013. Target dari kegiatan DAK tahun 2013 mengalami realisasi sebesar 61% dan sisanya 39% belum terealisasi. Dapat dikatakan tujuannya sudah terwujud, tetapi baru 61% saja.
4. Tujuan kegiatan DAK pendidikan menengah sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap di atas, belum terwujud secara maksimal. Karena dari

target yang ditulis, realisasinya sebesar 50%, tujuan kegiatan ini terwujud 50% saja, bisa dikatakan sudah terwujud sebagian.

5. Pada pendidikan dasar, indikator *input*, *process*, dan *output*, peneliti berpendapat semuanya sudah baik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas dan pihak sekolah penerima telah maksimal. Maka, dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Tingkat kelulusan tergolong tinggi dan angka ketidaklulusan pada pendidikan dasar, sangat kecil. Walaupun capaian kegiatan DAK pendidikan dasar di sini 61%, namun kelulusan tetap tinggi, yaitu 100% atau setidaknya mendekati 100%. Tidak pernah di bawah 95%.
6. Pada pendidikan menengah, usaha-usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan maupun sekolah penerima dari indikator *input*, *process*, dan *output*, telah baik, walau ada sedikit permasalahan di pihak sekolah. Dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Tingkat kelulusan tergolong tinggi, ada yang 100%, ada yang mendekati 100%, dan tidak pernah kurang dari 95%. Adapun angka ketidaklulusan pada pendidikan menengah sangat kecil. Kelulusan siswa bukan permasalahan DAK, karena setiap siswa diberi fasilitas yang sama dan kewajiban yang sama juga dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

C.2. Saran

1. Dinas Pendidikan mempersiapkan lahan sebagai infrastruktur pelaksanaan DAK.
2. Perlu peningkatan kinerja pada proses pelelangan (belanja), khususnya belanja buku referensi / buku peajaran, yang tadinya mengalami keterlambatan diharapkan dapat tepat waktu.
3. Dalam menentukan target sasaran, perlu lebih teliti menulis Daftar Penerima Anggaran, agar tidak terjadi duplikasi data dalam Daftar Penerima Anggaran.
4. Sebaiknya kebijakan DAK bidang pendidikan tersebut diperluas cakupannya karena berhasil baik, dan dampak negatifnya relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Nugroho D., Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Gramedia
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013*. Semarang : Biro Bangda
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

Regulasi :

- Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor 425 / 428 / 14 / tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cilacap

Internet :

- <http://produk hukum.kemenag.go.id/downloads/07e7490dd4ca902e5ea10a17e2ce5d98.pdf> (diakses pada tanggal 22 Mei 2014)
- <http://www.cilacapkab.go.id> (diakses pada tanggal 24 September 2014)
- http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Leaflet_Dana_Alokasi_Khusus.pdf (diakses pada tanggal 22 Mei 2014)
- <http://www.jatengprov.go.id> (diakses pada tanggal 3 Oktober 2013)
- <http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/135.pdf> (diakses pada tanggal 22 Mei 2014)

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Ari Subowo, MA
NIP. 196101011990011001